

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Laporan Keuangan**

##### **2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan adalah data yang mampu mencerminkan kinerja finansial dari aktivitas operasional suatu perusahaan. Laporan keuangan digunakan sebagai alat oleh para pengguna sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan pribadi mereka masing-masing. Menurut Hery (2021) mengungkapkan bahwa laporan keuangan merupakan output dari proses akuntansi yang berfungsi untuk menyampaikan informasi dan aktivitas keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan, menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1, laporan keuangan merupakan komponen dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang komprehensif umumnya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selain itu, juga termasuk informasi tambahan yang terkait dengan laporan tersebut, seperti informasi keuangan segmen industri dan geografis, serta penjelasan dampak perubahan harga.

### **2.1.2 Manfaat Laporan Keuangan**

Menurut Statement of Financial Accounting Concept terdapat manfaat laporan keuangan, yaitu sebagai berikut :

1. Laporan keuangan memberikan informasi yang dapat mendukung investor, kreditur, dan pihak-pihak lainnya dalam membuat keputusan yang sesuai dengan kepentingan individu masing-masing.
2. Laporan keuangan menyajikan informasi yang dapat membantu investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperkirakan waktu dan tingkat ketidakpastian penerimaan kas di masa depan, yang berasal dari pembagian deviden, pembayaran bunga, dan pendapatan dari penjualan.
3. Laporan keuangan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi perusahaan dan klaim atas sumber daya tersebut kepada perusahaan atau pemilik modal.
4. Laporan keuangan menyajikan informasi mengenai kinerja perusahaan selama suatu periode tertentu. Investor dan kreditor sering kali memanfaatkan informasi dari masa lampau untuk membantu menilai prospek perusahaan di masa depan.

## **2.2 Kinerja Keuangan**

### **2.2.1 Pengertian Kinerja Keuangan**

Kinerja perusahaan dapat diartikan sebagai upaya formal yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas

dari aktivitas yang telah dilaksanakan dalam suatu periode waktu tertentu. Menurut Rudianto (2023), kinerja keuangan adalah pencapaian manajemen perusahaan dalam mengelola aset perusahaan secara efektif dalam suatu periode tertentu. Kinerja keuangan menjadi sangat penting bagi perusahaan, karena memberikan gambaran dan evaluasi tentang sejauh mana kesuksesan perusahaan berdasarkan aktivitas keuangan yang telah dilakukan. Pengukuran kinerja didefinisikan sebagai "*performing measurement*," yang mencakup kompetensi, optimalisasi, dan produktivitas perusahaan dalam menjalankan operasional bisnis selama periode akuntansi. Oleh karena itu, kinerja dapat diartikan sebagai suatu upaya formal yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari aktivitas yang telah dilaksanakan dalam suatu periode waktu tertentu (Hanafi, 2023).

### **2.2.2 Tujuan Kinerja Keuangan**

Menurut Munawir (2022) menyatakan bahwa dalam mengevaluasi kinerja keuangan, tidak hanya membandingkan rasio keuangan berdasarkan standar rasio di satu periode, tetapi juga dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pengukuran kinerja keuangan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, dimana untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

2. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, dimana untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jika perusahaan mengalami proses likuidasi.
3. Untuk mengetahui tingkat aktivitas, dimana untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang dan beban bunga tepat waktu, serta melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham secara teratur tanpa mengalami kendala.
4. Untuk mengetahui tingkat profitabilitas, dimana untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba yang dibandingkan dengan penggunaan ekuitas dan aset secara produktif.

## **2.3 Rasio Keuangan**

### **2.3.1 Pengertian Rasio Keuangan**

Fahmi (2021) menyatakan bahwa rasio keuangan adalah alat analisis untuk menilai kinerja perusahaan dengan menguraikan berbagai keterkaitan dan indikator keuangan. Tujuannya adalah untuk menunjukkan perubahan dalam situasi keuangan atau kinerja operasional di masa sebelumnya, serta membantu dalam mengidentifikasi tantangan dan prospek yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. Selain itu berdasarkan pendapat Kasmir (2022) menyatakan bahwa rasio keuangan adalah teknik yang digunakan untuk membagi angka-angka dalam laporan keuangan, memungkinkan perbandingan antara berbagai elemen dalam satu laporan keuangan atau antara elemen-elemen dari laporan keuangan yang berbeda. Analisis rasio keuangan dapat dilakukan dalam

satu periode atau melibatkan beberapa periode. Dalam menganalisis rasio keuangan perusahaan, terdapat berbagai jenis rasio yang dapat digunakan, seperti rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, rasio likuiditas, dan rasio aktivitas. Setiap jenis rasio memberikan interpretasi khusus dalam menilai laporan keuangan.

### 2.3.2 Jenis-jenis Rasio Keuangan

Terdapat beberapa jenis rasio keuangan yang umum digunakan, sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Riyanto (2019) :

1. Rasio Likuiditas

Adalah rasio-rasio yang bertujuan untuk mengukur tingkat likuiditas perusahaan, seperti *current ratio* dan *acid test ratio*.

2. Rasio Solvabilitas (*Leverage*)

Adalah rasio-rasio yang bertujuan untuk menilai sejauh mana aset perusahaan didanai oleh utang, contohnya *debt to total assets ratio*, *net worth to debt ratio*, dan lain sebagainya.

3. Rasio Aktivitas

Adalah rasio-rasio yang bertujuan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya, termasuk *inventory turnover*, *average collection period*, dan lain sebagainya.

4. Rasio Profitabilitas

Adalah rasio-rasio ini mencerminkan hasil akhir dari berbagai kebijakan dan keputusan, seperti *profit margin on sales*, *return on*

*total assets, return on net worth, dan sebagainya.*

## **2.4 BUMN Infrastruktur**

### **2.4.1 Pengertian BUMN**

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia dapat mengambil bentuk Persero atau Perum, dimana kepemilikannya sepenuhnya atau sebagian besar dimiliki oleh negara. Tujuan utama pendirian BUMN adalah untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum dengan menyediakan barang dan/atau jasa berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat umum.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, BUMN adalah badan usaha yang modalnya sepenuhnya atau sebagian besar dimiliki oleh negara melalui kontribusi langsung dari kekayaan negara yang diisolasi. Undang-Undang yang sama juga menetapkan bahwa kekayaan negara yang diisolasi berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang digunakan sebagai penyertaan modal negara dalam persero, perum, dan perusahaan terbatas lainnya.

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara menjelaskan bahwa BUMN dapat berupa perusahaan perseroan (Persero) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998,

atau perusahaan umum (Perum) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998.

#### **2.4.2 Tujuan Pendirian BUMN**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, bahwa maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah:

1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
2. Mengejar keuntungan;
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

#### **2.4.3 Kelompok BUMN Infrastruktur**

BUMN di Indonesia dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu BUMN non jasa keuangan dan BUMN jasa keuangan. BUMN non jasa keuangan sendiri terdiri dari dua jenis, yakni BUMN infrastruktur dan BUMN Non Infrastruktur. BUMN infrastruktur, dalam hal ini mencakup sejumlah sektor, seperti sektor perhubungan. Tiap sektor dapat dibagi

menjadi beberapa bidang, seperti bidang prasarana perhubungan udara. Kemudian, setiap bidang dapat terdiri dari beberapa perusahaan. Sebagai contoh, dalam sektor perhubungan, pada bidang prasarana perhubungan, terdapat BUMN infrastruktur seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Indonesia.

Menurut Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Negara Nomor: KEP100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara, bahwa BUMN infrastruktur adalah BUMN yang kegiatannya menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat luas, yang bidang usahanya meliputi :

1. Pembangkitan, transmisi atau pendistribusian tenaga listrik.
2. Pengadaan dan atau pengoperasian sarana pendukung pelayanan angkutan barang ataupun penumpang baik laut, udara atau kereta api.
3. Jalan dan jembatan tol, dermaga pelabuhan laut atau sungai dan danau, lapangan terbang dan bandara.
4. Bendungan dari irigasi.



## 2.5 Penggolongan Tingkat Kesehatan BUMN

Kesehatan BUMN dapat dinilai sebagai sehat, kurang sehat, atau tidak sehat, bergantung pada perolehan total skor (TS) yang diperoleh. Adapun penilaian tingkat kesehatan BUMN berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP100/MBU/2002 digolongkan menjadi :

1. SEHAT, yang terdiri dari :
  - a. AAA apabila TS lebih besar dari 95
  - b. AA apabila  $80 < TS \leq 95$
  - c. A apabila  $65 < TS \leq 80$
2. KURANG SEHAT, yang terdiri dari :
  - a. BBB apabila  $50 < TS \leq 65$
  - b. BB apabila  $40 < TS \leq 50$
  - c. B apabila  $30 < TS \leq 40$
3. TIDAK SEHAT, yang terdiri dari :
  - a. CCC apabila  $20 < TS \leq 30$
  - b. CC apabila  $10 < TS \leq 20$
  - c. C apabila  $TS \leq 10$

## 2.6 Aspek-Aspek Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN Infrastruktur

Penilaian tingkat kesehatan BUMN Infrastruktur dilakukan pada setiap tahun dan meliputi tiga aspek. Menurut Salinan Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-100/MBU/2002, bahwa tingkat kesehatan BUMN ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap kinerja perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan yang meliputi :

Tabel 2. 1 Daftar Aspek Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN Infrastruktur

<b>Indikator</b>	<b>Infrastruktur</b>	<b>Non Infrastruktur</b>
1. Aspek Keuangan	50	.....
2. Aspek Operasional	35	.....
3. Aspek Administrasi	15	.....

Sumber : SK Menteri BUMN Nomor : KEP-100/MBU/2002

## 2.7 Indikator Aspek Keuangan BUMN Infrastruktur

Menurut Lampiran Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Negara Nomor: KEP100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara, bahwa penilaian tingkat kesehatan berdasarkan aspek keuangan terdiri dari atas 8 (Delapan) indikator dengan total bobot bagi semua indikator sebesar 50 untuk BUMN infrastruktur.

Tabel 2. 2 Daftar Indikator dan Bobot Aspek Keuangan

Indikator	Bobot	
	Infrastruktur	Non Infrastruktur
1. Imbalan kepada pemegang saham (ROE)	15	.....
2. Imbalan Investasi (ROI)	10	.....
3. Rasio Kas	3	.....
4. Rasio Lancar	4	.....
5. Colection Periods	4	.....
6. Perputaran persediaan	4	.....
7. Perputaran total asset	4	.....
8. Rasio modal sendiri terhadap total aktiva	6	.....
<b>Total Bobot</b>	<b>50</b>	<b>.....</b>

Sumber : SK Menteri BUMN Nomor : KEP-100/MBU/2002

Berikut ini penjelasan masing-masing indikator tentang rumus definisi dan daftar skor penilaian.

a. Imbalan kepada pemegang saham/Return On Equity (ROE)

**Rumus :**

$$ROE = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

**Definisi :**

- 1) Laba setelah Pajak adalah Laba setelah Pajak dikurangi dengan laba hasil penjualan dari :
  - a) Aktiva tetap
  - b) Aktiva Non Produktif
  - c) Aktiva Lain-lain
  - d) Saham Penyertaan Langsung

- 2) Modal Sendiri adalah seluruh komponen Modal Sendiri dalam neraca perusahaan pada posisi akhir tahun buku dikurangi dengan komponen Modal sendiri yang digunakan untuk membiayai Aktiva Tetap dalam Pelaksanaan dan laba tahun berjalan. Dalam Modal sendiri tersebut di atas termasuk komponen kewajiban yang belum ditetapkan statusnya.
- 3) Aktiva Tetap dalam pelaksanaan adalah posisi pada akhir tahun buku Aktiva Tetap yang sedang dalam tahap pembangunan.

Tabel 2. 3 Daftar Skor Penilaian ROE

ROE (%)	Skor	
	Infrastruktur	Non Infrastruktur
15 < ROE	15	.....
13 < ROE ≤ 15	13,5	.....
11 < ROE ≤ 13	12	.....
9 < ROE ≤ 11	10,5	.....
7,9 < ROE ≤ 9	9	.....
6,6 < ROE ≤ 7,9	7,5	.....
5,3 < ROE ≤ 6,6	6	.....
4 < ROE ≤ 5,3	5	.....
2,5 < ROE ≤ 4	4	.....
1 < ROE ≤ 2,5	3	.....
0 < ROE ≤ 1	1,5	.....
ROE < 0	1	.....

Sumber : SK Menteri BUMN Nomor : KEP-100/MBU/2002

b. Imbalan Investasi/Return On Investment (ROI)

**Rumus :**

$$\text{ROI} = \frac{\text{EBIT} + \text{Penyusutan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$$

**Definisi :**

- 1) EBIT adalah laba sebelum bunga dan pajak dikurangi laba dari hasil penjualan dari :
  - a) Aktiva Tetap
  - b) Aktiva lain-lain
  - c) Aktiva Non Produktif
  - d) Saham penyertaan langsung
- 2) Penyusutan adalah Depresiasi, Amortisasi dan Deplesi
- 3) Capital Employed adalah posisi pada akhir tahun buku Total Aktiva dikurangi Aktiva Tetap dalam pelaksanaan.

Tabel 2. 4 Daftar Skor Penilaian ROI

ROI (%)	Skor	
	Infrastruktur	Non Infrastruktur
18 < ROI	10	.....
15 < ROI ≤ 18	9	.....
13 < ROI ≤ 15	8	.....
12 < ROI ≤ 13	7	.....
10,5 < ROI ≤ 12	6	.....
9 < ROI ≤ 10,5	5	.....
7 < ROI ≤ 9	4	.....
5 < ROI ≤ 7	3,5	.....
3 < ROI ≤ 5	3	.....
1 < ROI ≤ 3	2,5	.....
0 < ROI ≤ 1	2	.....
ROI < 0	0	.....

Sumber : SK Menteri BUMN Nomor : KEP-100/MBU/2002

c. Rasio Kas/Cash Ratio

**Rumus :**

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank} + \text{Surat Berharga Jangka Pendek}}{\text{Current Liabilities}} \times 100\%$$

**Definisi :**

- 1) Kas, Bank dan surat Berharga Jangka Pendek adalah posisi masing-masing pada akhir tahun buku.
- 2) Current Liabilities adalah posisi seluruh kewajiban Lancar pada akhir tahun buku.

Tabel 2. 5 Daftar Skor Penilaian Cash Ratio

Cash Ratio = x (%)	Skor	
	Infrastruktur	Non Infrastruktur
$x \geq 35$	3	.....
$25 \leq x < 35$	2,5	.....
$15 \leq x < 25$	2	.....
$10 \leq x < 15$	1,5	.....
$5 \leq x < 10$	1	.....
$0 \leq x < 5$	0	.....

Sumber : SK Menteri BUMN Nomor : KEP-100/MBU/2002

d. Rasio Lancar/Current Ratio

**Rumus :**

$$\text{Current ratio} = \frac{\text{Current Asset}}{\text{Current Liabilities}} \times 100\%$$

**Definisi :**

- 1) Current Asset adalah posisi Total Aktiva Lancar pada akhir tahun buku.
- 2) Current Liabilities adalah posisi Total Kewajiban Lancar pada akhir tahun buku .

Tabel 2. 6 Daftar Skor Penilaian Current Ratio

Current Ratio = x (%)	Skor	
	Infrastruktur	Non Infrastruktur
125 <= x	3	.....
110 <= x < 125	2,5	.....
100 <= x < 110	2	.....
95 <= x < 100	1,5	.....
90 <= x < 95	1	.....
x < 90	0	.....

Sumber : SK Menteri BUMN Nomor : KEP-100/MBU/2002

e. Collection Periods (CP)

**Rumus :**

$$CP = \frac{\text{Total Piutang Usaha}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari}$$

**Definisi :**

- 1) Total Piutang Usaha adalah posisi Piutang Usaha setelah dikurangi Cadangan Penyisihan Piutang pada akhir tahun buku.
- 2) Total Pendapatan Usaha adalah jumlah Pendapatan Usaha selama tahun buku.



Tabel 2. 7 Daftar Skor Penilaian Collection Periods

CP = x (hari)	Perbaikan (hari)	Skor	
		Infrastruktur	Non Infrastruktur
$x \leq 60$	$x > 35$	4	.....
$60 < x \leq 90$	$30 < x \leq 35$	3,5	.....
$90 < x \leq 120$	$25 < x \leq 30$	3	.....
$120 < x \leq 150$	$20 < x \leq 25$	2,5	.....
$150 < x \leq 180$	$15 < x \leq 20$	2	.....
$180 < x \leq 210$	$10 < x \leq 15$	1,6	.....
$210 < x \leq 240$	$6 < x \leq 10$	1,2	.....
$240 < x \leq 270$	$3 < x \leq 6$	0,8	.....
$270 < x \leq 300$	$1 < x \leq 3$	0,4	.....
$300 < x$	$0 < x \leq 1$	0	.....

Sumber : SK Menteri BUMN Nomor : KEP-100/MBU/2002

f. Perputaran Persediaan (PP)

**Rumus :**

$$PP = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365$$

**Definisi :**

- 1) Total Persediaan adalah seluruh persediaan yang digunakan untuk proses produksi pada akhir tahun buku yang terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi dan persediaan barang jadi ditambah persediaan peralatan dan suku cadang.
- 2) Total Pendapatan Usaha adalah Total Pendapatan Usaha dalam tahun buku yang bersangkutan.

Tabel 2. 8 Daftar Skor Penilaian Perputaran Persediaan

PP = x (hari)	Perbaikan (hari)	Skor	
		Infrastruktur	Non Infrastruktur
$x \leq 60$	$35 < x$	4	.....
$60 < x \leq 90$	$30 < x \leq 35$	3,5	.....
$90 < x \leq 120$	$25 < x \leq 30$	3	.....
$120 < x \leq 150$	$20 < x \leq 25$	2,5	.....
$150 < x \leq 180$	$15 < x \leq 20$	2	.....
$180 < x \leq 210$	$10 < x \leq 15$	1,6	.....
$210 < x \leq 240$	$6 < x \leq 10$	1,2	.....
$240 < x \leq 270$	$3 < x \leq 6$	0,8	.....
$270 < x \leq 300$	$1 < x \leq 3$	0,4	.....
$300 < x$	$0 < x \leq 1$	0	.....

Sumber : SK Menteri BUMN Nomor : KEP-100/MBU/2002

g. Perputaran Total Asset/Total Asset Turn Over (TATO)

**Rumus :**

$$\text{TATO} = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$$

**Definisi :**

- 1) Total Pendapatan adalah Total Pendapatan Usaha dan Non Usaha tidak termasuk pendapatan hasil penjualan Aktiva Tetap.
- 2) Capital Employed adalah posisi pada akhir tahun buku total Aktiva dikurangi Aktiva Tetap Dalam Pelaksanaan.

Tabel 2. 9 Daftar Skor Penilaian Perputaran Total Aset

TATO = x (%)	Perbaikan = x (%)	Skor	
		Infrastruktur	Non Infrastruktur
120 < x	20 < x	4	.....
105 < x <= 120	15 < x <= 20	3,5	.....
90 < x <= 105	10 < x <= 15	3	.....
75 < x <= 90	5 < x <= 10	2,5	.....
60 < x <= 75	0 < x <= 5	2	.....
40 < x <= 60	x <= 0	1,5	.....
20 < x <= 40	x < 0	1	.....
x <= 20	x < 0	0,5	.....

Sumber : SK Menteri BUMN Nomor : KEP-100/MBU/2002

h. Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Aset (TMS terhadap TA)

**Rumus :**

$$\text{TMS terhadap TA} = \frac{\text{Total Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

**Definisi :**

- 1) Total Modal Sendiri adalah seluruh komponen Modal Sendiri pada akhir tahun buku diluar dana-dana yang belum ditetapkan statusnya.
- 2) Total Aset adalah Total Aset dikurangi dengan dana-dana yang belum ditetapkan statusnya pada poisisi akhir tahun buku yang bersangkutan.

Tabel 2. 10 Daftar Skor Penilaian Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Asset

TMS thd TA (%) = x	Skor	
	Infrastruktur	Non Infrastruktur
$x < 0$	0	.....
$0 \leq x < 10$	2	.....
$10 \leq x < 20$	3	.....
$20 \leq x < 30$	4	.....
$30 \leq x < 40$	6	.....
$40 \leq x < 50$	5,5	.....
$50 \leq x < 60$	5	.....
$60 \leq x < 70$	4,5	.....
$70 \leq x < 80$	4,25	.....
$80 \leq x < 90$	4	.....
$90 \leq x < 100$	3,5	.....

Sumber : SK Menteri BUMN Nomor : KEP-100/MBU/2002

## 2.8 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 11 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil
1	Dewi Safitri Hakim, Hasanuddin Remmang, dan Haeruddin Saleh (2020)	Analisis Kinerja Keuangan Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Indonesia	Metode Kuantitatif dengan Analisis Deskriptif	Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh yaitu menunjukkan kinerja sangat baik, hal ini dijelaskan melalui hasil perhitungan

No	Nama dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil
				Keputusan Menteri BUMN No.KEP-100/MBU/2002.
2	Syahrina Ramadhani, Kusni Hidayati, dan Nova Retnowati (2021)	Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan Rasio Likuiditas, Solvabilitas dan Profitabilitas terhadap Kinerja Keuangan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan	Metode Kualitatif dengan Analisis Deskriptif	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2014-2016 adalah cenderung berfluktuasi namun dinilai cukup baik dan perlu adanya peningkatan.
3	Rini Musada (2023)	Analisis Likuiditas, Profitabilitas, Dan Solvabilitas Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Depok	Metode Kuantitatif dengan Analisis Deskriptif	Hasil Rasio Likuiditas menunjukkan bahwa perusahaan yang dianggap likuid walaupun terjadi penurunan di tahun 2019 dan memiliki kondisi keuangan yang baik. Hasil Rasio Profitabilitas menunjukkan bahwa perusahaan cukup mampu

No	Nama dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil
				mengelola investasi walaupun terjadi penurunan setiap periode. Hasil Rasio Solvabilitas menunjukkan bahwa perusahaan cukup mampu membayar kewajibannya dengan jaminan aset dan ekuitasnya walaupun terjadi peningkatan setiap periode.
4	Nurafni, Nurman, dan Andi Mustika Amin (2022)	Analisis Kinerja Keuangan Pada PT. Pegadaian (Persero) Periode 2015-2019	Metode Kuantitatif	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan PT. Pegadaian (Persero) Periode 2015-2019 Sangat Baik, yaitu berada pada penilaian "A" $65 < TS \leq 80$ .
5	Muliana dan Muhammad Fachril Haris (2022)	Analisis Kinerja Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Berdasarkan SK Menteri BUMN	Metode Analisis Deskriptif Kuantitatif	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan kinerja keuangan PT Garuda Indonesia (Persero)

No	Nama dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil
		No. KEP 100/MBU/2002		Tbk periode 2015-2020 dilihat dari rasio Return On Equity (ROE) menunjukkan rata-rata enam tahun terakhir sebesar -22,51% atau dalam keadaan tidak baik. Untuk rasio Return On Investment (ROI) menunjukkan rata-rata enam tahun terakhir sebesar -2,44% atau dalam keadaan tidak baik. Secara keseluruhan rasio profitabilitas apabila diukur dari tingkat kesehatannya memperoleh total skor 2,85% atau dalam kondisi tidak sehat dengan kategori C.